

Implementation of the Local Economic Development Women's Empowerment Program (P3EL) in Improving Women's Economic Welfare in Sidoarjo Regency

[Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo]

Vivie Ida Isna Nur Aini¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *The implementation of the Women's Empowerment Program for Local Economic Development (P3EL) in Sidoarjo Regency aims to improve women's economic welfare by encouraging their active role in local economic activities. This study uses a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected purposively, and the research was conducted at the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) of Sidoarjo Regency. Based on George C. Edward III's policy implementation theory, the findings show that (a) communication through socialization efforts has been relatively successful, although not yet evenly distributed, (b) human and financial resources are sufficient, supported by the regional budget and Bank Jatim, (c) implementers demonstrate good understanding and commitment, and (d) bureaucratic structures operate according to standard operating procedures. Overall, the implementation of P3EL is considered quite effective in promoting women's economic empowerment, although it is still limited to several districts.*

Keywords - Implementation; Public Policy; Women's Empowerment; Welfare.

Abstrak. *Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui peran aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive dan penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) komunikasi melalui sosialisasi cukup berhasil meski belum merata, (b) sumber daya manusia dan anggaran memadai, didukung APBD dan Bank Jatim, (c) disposisi pelaksana menunjukkan pemahaman dan komitmen yang baik, dan (d) struktur birokrasi berjalan sesuai SOP. Secara keseluruhan, implementasi program P3EL dinilai berjalan cukup baik dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, meskipun cakupan wilayah pelaksanaan masih terbatas pada beberapa kecamatan.*

Kata Kunci - Implementasi; Kebijakan Publik; Pemberdayaan Perempuan; Kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini dapat tercapai melalui pembangunan nasional yang mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan [1]. Pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi, seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan pemerintah dengan fokus utama pada pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan [2]. Kesejahteraan menunjuk pada keadaan dimana masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera, makmur, sehat, dan damai. [3]. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya [4].

Dalam upaya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Perempuan seringkali menjadi pilar utama keluarga dengan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Terbatasnya pendapatan yang dihasilkan oleh kepala keluarga (suami) mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam membantu menambah penghasilan keluarga. Namun, perempuan dari kelompok berpenghasilan

rendah sering menghadapi tantangan terkait status gender mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif guna meningkatkan partisipasi perempuan [5].

Saat ini, banyak program kesejahteraan perempuan cenderung bersifat sementara dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perempuan. Selain itu, program-program tersebut sering kali kurang dirancang secara komprehensif untuk pemberdayaan perempuan dalam skala luas. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan kebijakan melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan. Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan [6].

Pemberdayaan perempuan memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan, karena memberikan peluang bagi perempuan untuk memiliki kekuatan mendasar dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan pemberdayaan ekonomi, perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas ke pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya finansial, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Saat ini, banyak perempuan yang harus mengambil peran sebagai tulang punggung sekaligus kepala keluarga akibat tuntutan kondisi. Pandangan sosial yang sebelumnya membatasi peran ibu hanya pada pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga kini mulai tergeser oleh realitas perempuan yang menjadi kepala keluarga. Meskipun peran kepala rumah tangga umumnya diemban oleh laki-laki, terdapat cukup banyak keluarga yang dipimpin oleh perempuan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender di masyarakat. Persentase perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Persentase Kepala Keluarga Perempuan Tahun 2023 di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. (diolah)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disajikan pada gambar 1, terlihat bahwa persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga menunjukkan peningkatan sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kematian suami, perceraian, atau kondisi suami yang tidak mampu bekerja karena cacat. Dalam situasi tersebut, perempuan harus mengambil peran ganda, yaitu sebagai pengelola keluarga sekaligus pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka [7]. Perempuan yang menjalani peran ganda ini sering menghadapi tekanan ekonomi serta tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk bekerja di sektor formal dan mendorong mereka ke sektor informal. Pemberdayaan perempuan menjadi pendekatan yang relatif baru dalam mengerakkan perubahan masyarakat, dengan memulai langkah perubahan melalui penanganan isu-isu prioritas yang dihadapi.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian melalui program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian program tersebut diturunkan ke tingkat provinsi melalui BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dengan Nomor keputusan 413.44/35/211/2009 tentang Pendamping Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 [8]. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, sehingga mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam memperkuat perekonomian lokal. Program ini berfokus pada peningkatan akses perempuan terhadap berbagai sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan pasar, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Melalui program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), diharapkan dapat tercipta kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan perempuan, dan memperkuat posisi mereka untuk mencapai kesetaraan gender. Tantangan utama dalam pelaksanaan program P3EL adalah bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan gender dalam penghasilan.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mendukung dengan antusias pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) adalah Kabupaten Sidoarjo yang diterapkan mulai tahun 2010.

Program ini merupakan program pemberdayaan yang diperuntukkan bagi perempuan dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga. Implementasi dari Program P3EL adalah dengan memberikan bantuan modal kepada kelompok perempuan yang memiliki usaha dengan modal minim (seperti “bakul” atau pedagang makanan). Berdasarkan hasil penelitian Ridaningrum (2008) tentang Program P3EL ditemukan bahwa pemahaman dasar atas Program P3EL kurang mendalam ditanamkan pada kelompok sasaran, akibatnya mereka merasa bahwa Program P3EL bukan program pemberdayaan melainkan program bagi-bagi uang kepada perempuan. Tingginya jumlah kepala rumah tangga perempuan di daerah ini membuka peluang besar untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta dampak positif yang memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Data terkait persentase kepala rumah tangga perempuan di Kabupaten Sidoarjo disajikan dalam gambar berikut:

Tabel 1. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Kepala Rumah Tangga Perempuan
1.	Tarik	4.443
2.	Prambon	5.353
3.	Krembung	4.692
4.	Porong	5.132
5.	Jabon	4.023
6.	Tanggulangin	5.608
7.	Candi	9.514
8.	Sidoarjo	14.075
9.	Tulangan	6.401
10.	Wonoayu	5.049
11.	Krian	8.601
12.	Balongbendo	4.883
13.	Taman	13.745
14.	Sukodono	6.786
15.	Buduran	6.134
16.	Gedangan	7.380
17.	Sedati	6.008
18.	Waru	14.927
Jumlah		132.754

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan total 132.754 perempuan memimpin rumah tangga di wilayah tersebut. Jumlah ini tersebar di 18 kecamatan dengan variasi yang signifikan. Kecamatan Waru mencatat jumlah tertinggi (14.927), disusul Sidoarjo (14.075) dan Taman (13.745). Sebaliknya, Jabon memiliki jumlah terendah (4.023). Perbedaan ini mengindikasikan potensi kerentanan sosial-ekonomi yang beragam antar kecamatan, mengingat kepala rumah tangga perempuan dapat berkaitan dengan perceraian, kematian suami, atau faktor lainnya. Dalam konteks ini, program pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan, sehingga perempuan dapat tetap berpartisipasi di pasar kerja dan mencapai potensi maksimal mereka. Program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian akses modal usaha, dapat membantu perempuan memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, perempuan dengan balita juga dapat diberdayakan agar tetap dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

Salah satu tujuan utama program P3EL adalah meningkatkan kesadaran dan keyakinan perempuan bahwa usaha ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama (kooperatif) lebih menguntungkan dibandingkan menjalankan usaha secara individu. Kebijakan P3EL dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Program ini memiliki peran penting, karena melalui pemberdayaan perempuan, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan. Dengan akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi seperti pendidikan, pelatihan, dan modal, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang layak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Oleh karena itu, pelaksanaan program P3EL diharapkan dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dalam konteks implementasi kebijakan, George Edward III (1980), seorang teoritis kebijakan publik, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses yang sangat penting. Sebaik apa pun suatu kebijakan dirancang, jika implementasinya tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Edward III menyatakan bahwa ada empat variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan [9].

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan implementasi program P3EL di antaranya, Riska Widya, 2009 “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL PLUS) (Studi deskriptif tentang faktor-faktor determinan yang mendukung keberhasilan implementasi program pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal plus (P3EL plus) di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya)” menunjukkan bahwa aktor penentu keberhasilan pelaksanaan program P3EL Plus antara lain jumlah staf yang memadai dari pengusaha mitra, kemampuan teknis dan manajerial staf yang kuat, alokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pelatihan, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelatihan. Faktor komunikasi yang efektif antara lain bimbingan intensif dari instansi pemerintah mengenai arah program, bimbingan intensif dari petugas hingga kelompok penasehat, dan sosialisasi yang jelas [10]. Lisa Iryani, 2021 “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Bidang Usaha Industri Kecil (Studi Di Gampong Matang Meunye Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)”, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui usaha industri kecil, pemerintah masih belum optimal dalam penerapannya. Masalah utama yang dihadapi adalah sosialisasi yang belum berjalan sepenuhnya, serta terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kualitas sumber daya manusia yang ada [11]. Dan Sri Wibawani, Fadiyah Suci Rahmadini, dan Safitri Nur Laili, 2021 “Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Di Kabupaten Sidoarjo”, menunjukkan bahwa Koordinasi antar lembaga saat ini hanya terjadi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bank Jatim, yang mempermudah proses pengambilan keputusan dalam menerima kelompok pengajuan program. Meskipun koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik, seleksi yang sangat ketat dari Bank Jatim menyebabkan target program P3EL yang ditetapkan oleh Dinas tidak tercapai. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program ini juga menjadi salah satu alasan mengapa target Dinas tidak dapat terpenuhi [12]. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program P3EL tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah tim yang memadai dari pengusaha mitra, kemampuan teknis dan manajerial tim yang kuat, alokasi anggaran yang cukup untuk pelatihan, dan memadai fasilitas yang mendukung pelatihan. Faktor komunikasi yang efektif antara lain adanya bimbingan intensif dari instansi pemerintah mengenai arah program, bimbingan intensif dari petugas lapangan hingga kelompok penasehat, dan sosialisasi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serupa dengan penelitian sebelumnya, namun dengan fokus yang lebih mendalam pada implementasi di Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui metode triangulasi, memberikan validitas tambahan dibandingkan beberapa penelitian terdahulu yang cenderung deskriptif. Kontribusi baru yang ditawarkan adalah penyajian data terkini (2023) tentang distribusi kepala rumah tangga perempuan di Sidoarjo, yang memberikan wawasan tambahan tentang relevansi dan dampak program pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga menambahkan konteks lokal yang lebih spesifik untuk memahami keberhasilan dan tantangan implementasi program P3EL.

Dalam pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan beberapa kendala yang menghambat implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pihak kelurahan, dan Pemerintah Desa. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai program P3EL juga menjadi masalah signifikan, karena banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang belum mengetahui manfaat dari program ini. Kurangnya sosialisasi ini menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuan program, karena dapat menghambat keterlibatan perempuan, mengurangi pemahaman mereka tentang manfaat yang dapat diperoleh, dan menurunkan tingkat dukungan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo”.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada memahami kondisi alami dari objek yang diteliti, dengan peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam proses penelitian. Data dikumpulkan menggunakan metode triangulasi, dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam atau makna daripada membuat generalisasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara terstruktur, yang meliputi: (a) Observasi, dilakukan melalui pengamatan langsung dengan pencatatan kondisi atau perilaku objek sasaran, (b) Wawancara, dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden terkait, (c) Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan, serta sebagai bahan referensi dalam memverifikasi keabsahan data. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang PLKD (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Penerima manfaat program P3EL Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles and Huberman, yang meliputi: (a) Pengumpulan Data, di mana data yang diperoleh belum dianalisis secara langsung, (b) Reduksi Data, tahap ini berfungsi untuk mengarahkan, mengelompokkan, menyaring, dan mengorganisir data yang relevan, (c) Penyajian Data, menyusun informasi secara sistematis untuk membantu dalam menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan, (d) Penarikan Kesimpulan, tahap akhir dalam analisis data untuk membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat dari proses pengumpulan data [13].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada periode 2009 hingga 2012, program Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo masih berjalan secara non-channeling, yang berarti seluruh proses pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo tanpa melibatkan pihak eksternal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam sistem ini, Dinas PMD bertanggung jawab penuh atas berbagai tahapan pelaksanaan program, termasuk pengumpulan data calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi proposal pengajuan dana, serta pencairan dana secara langsung kepada penerima manfaat. Proses ini dilakukan secara manual dan langsung oleh pemerintah daerah tanpa adanya perantara dalam pendistribusian dana bantuan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem *non-channeling* ini menghadapi beberapa kendala, terutama terkait potensi penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi dalam distribusi anggaran, serta risiko administrasi dalam pencairan dana. Mengingat semakin kompleksnya pengelolaan anggaran serta perlunya pengawasan yang lebih ketat, sejak tahun 2013, Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo mulai beralih ke system *channeling* dengan mengandeng Bank Jatim sebagai mitra dalam proses penyaluran dana program P3EL.

Keputusan untuk bermitra dengan Bank Jatim didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Salah satunya adalah untuk meminimalisir risiko penyelewengan dana dengan memastikan bahwa pencairan dilakukan secara lebih transparan melalui sistem perbankan yang terorganisir. Dengan adanya keterlibatan pihak bank, setiap transaksi keuangan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, penggunaan layanan perbankan juga memungkinkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap alur keuangan, baik dari pihak Dinas PMD, Bank Jatim, maupun auditor independen yang berwenang. Selain aspek transparansi, kerja sama dengan Bank Jatim juga membawa manfaat dari segi efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Sebelumnya, dalam sistem *non-channeling*, proses pencairan dana sering kali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melewati berbagai tahapan administrasi di tingkat pemerintah daerah. Namun, dengan sistem *channeling*, mekanisme pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat dan langsung masuk ke rekening penerima manfaat. Hal ini tidak hanya mempercepat realisasi program tetapi juga mengurangi risiko kesalahan administratif yang dapat terjadi dalam sistem manual. Lebih lanjut, keterlibatan Bank Jatim juga memberikan manfaat tambahan dalam hal kemudahan akses bagi

penerima manfaat. Para penerima dana bantuan kini dapat mengambil dana mereka melalui berbagai layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Jatim, baik melalui teller di kantor cabang maupun melalui fasilitas ATM.

Dengan demikian, program P3EL dapat berjalan lebih lancar dan efisien tanpa adanya keterlambatan pencairan yang sering terjadi pada sistem sebelumnya. Secara keseluruhan, perubahan sistem dari *non-channeling* ke *channeling* dengan melibatkan Bank Jatim sebagai mitra penyaluran dana merupakan langkah strategis yang diambil oleh Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan transparansi, mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, mempercepat proses pencairan dana, serta memastikan dana bantuan benar-benar sampai ke penerima yang berhak secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, diharapkan program P3EL dapat semakin berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Penelitian terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo akan dijelaskan berdasarkan teori George C. Edward III, sebagai berikut :

Komunikasi

Aspek Komunikasi memainkan peran penting bagi berlangsungnya implementasi pada umumnya. Namun komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Berdasarkan pengertian George C. Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat [14]. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting dalam proses implementasi sebuah program karena memungkinkan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran program dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Komunikasi dalam Implementasi program P3EL di Kabupaten Sidoarjo merupakan sekelompok orang yang dikoordinasikan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Program P3EL yang terdiri dari Bidang PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat) Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai sosialisasi program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“mengenai program P3EL ini kita sudah sosialisasikan dan programnya memang sudah berjalan Mbak. Namun tidak semua kecamatan yang ada di Sidoarjo hanya di Kecamatan Sedati, Tulangan, Waru, jabon, kremlung, buduran, kelurahan sidokare. Memang tidak semua kecamatan di Sidoarjo tapi hampir semua dan untuk pelaksana program P3EL ini adalah bidang PUEM (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat) Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)



Gambar 2. Sosialisasi Program P3EL Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar 2, menunjukkan kegiatan sosialisasi Program P3EL yang diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat program dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Peserta yang hadir terdiri dari berbagai kelompok penerima manfaat serta pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat lebih memahami prosedur pencairan dana, pengelolaan pinjaman, serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai koordinasi pihak terkait pelaksanaan program P3EL, sebagai berikut:

“kita selalu koordinasi dengan bidang PUEM dan pihak desa terkait kebijakan ini agar banyak kelompok usaha yang membutuhkan modal berpartisipasi dalam program ini. Dengan adanya sosialisasi terkait

program ini untuk menghidupkan perekonomian di masyarakat terus jadi kita support, oh ini lo ada pinjaman dengan bunga rendah dari pemerintah” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Program Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat melalui skema pinjaman yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat. Program ini menargetkan kelompok usaha di berbagai desa dan kecamatan agar dapat meningkatkan produktivitas serta kemandirian ekonomi. Setiap kelompok penerima tersebut di beberapa wilayah strategis dengan bidang usaha yang beragam. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil wawancara di atas, berikut adalah daftar kelompok penerima pinjaman dalam Program P3EL beserta wilayahnya :

Tabel 2. Kelompok Penerima Pinjaman Program P3EL

No.	Kelompok Penerima	Wilayah
1	Avia Sari	Desa Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo
2	Sari Kedelai	Desa Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo
3	Anggrek	Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan
4	Dahlia	Kecamatan Porong
5	Sedap Malam	Desa Masangan Kulon, Kecamatan Buduran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaanya sosialisasi ini tidak berjalan di seluruh kecamatan di Sidoarjo. Saat ini ada 5 (lima) kelompok penerima pinjaman dari program P3EL, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Buduran. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi program P3EL di Kabupaten Sidoarjo melibatkan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas program tersebut, dengan fokus lingkup pemberdayaan usaha ekonomi perempuan. Keberhasilan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung inisiatif pembangunan ekonomi melalui program P3EL. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosseriayu Murenati Putri, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Farida Nurani, 2013) dengan judul “Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Jender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang “ menunjukkan hasil monitoring serta evaluasi, pada kegiatan P3EL ini telah menunjukkan adanya suatu usaha yang maksimal dengan terpilihnya Desa Genengan Jasem. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari adanya pendampingan yang bertanggungjawab untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan. Serta sinergitas, koordinasi, dan sosialisasi antara kelompok kerja yang menjadi pelaksana Kabupaten Jombang maupun pelaksana Desa/Kelurahan/Kecamatan sangat terjalin dengan baik [15]. Oleh karena itu, Komunikasi diperlukan agar para pelaksana lebih konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Menurut Edward III, Komunikasi yang efektif bertujuan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan yang diterapkan, sehingga koordinasi yang baik dapat tercipta antara semua stakeholder, memudahkan pelaksanaan program, dan mengoptimalkan hasil yang diinginkan, Dalam pelaksanaannya dapat diukur melalui aspek sosialisasi dan koordinasi [16].

Sumber Daya

Aspek Sumber daya merupakan faktor yang turut berpengaruh dalam implementasi. Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu [14]. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lainnya dengan baik, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Indikator ini mencakup tentang kemampuan dari petugas dalam menerapkan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai sumber daya manusia dan kemampuan para pelaksana program P3EL. Sebagai berikut:

“pelaksana program P3EL ini adalah bidang PUEM. Kemampuan pemahaman terkait sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagai pelaksana ya kan kita juga ada sosialisasi untuk pengarahan. Ya tentunya harus memahami, kalau tidak memahami kan maka kelompok usaha juga tidak mengajukan proposal. Untuk pengarahan sendiri itu dari Dinas PMD melalui bidang PUEM tadi” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Bu Yetti juga menambahkan terkait sumber daya anggaran dalam mendukung implementasi P3EL, sebagai berikut:

“anggaran itu dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD, cuma pencairannya melalui Bank Jatim. Oh ya karena sekarang sudah channeling sudah bekerja sama dengan Bank jatim jadi kita juga melibatkan bank jatim. Dari APBD Kab Sidoarjo yang dicantolkan di Bank Jatim karena pencairannya melalui bank jatim” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaksana program P3EL sudah berkompeten dalam pelaksanaan program P3EL yang pengaruhnya dibantu oleh bidang PUEM pada Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Sumber anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD dibantu oleh Bank Jatim sebagai penyalur pinjaman dana kepada para pelaku usaha. Di Kabupaten Sidoarjo setiap kelompok memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 6 % per tahun. Tanggung jawab pinjaman bantuan modal bersifat tanggung renteng terhadap anggota kelompok yang bersangkutan, artinya, jika ada anggota dalam sebuah kelompok yang pembayaran angsurannya tidak terbayar, maka akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok yang beranggotakan 6 orang. Terdapat 5 kelompok yang memiliki sistem serupa, sehingga jika ada anggota yang tidak membayar, beban angsuran yang tertunggak akan dibagi rata di antara anggota-anggota lainnya dalam kelompok tersebut. [17]. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Selain itu kemampuan pelaksana dalam memahami dan melaksanakan kebijakan sangatlah penting, pengalokasian sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD yang pencairannya difasilitasi oleh Bank Jatim juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan P3EL. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arianne Sarah, 2017) dengan judul penelitian “Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan”. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam memanajemen sumber daya secara efektif sangatlah penting [18]. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia dan dukungan sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting karena keduanya mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup serta sumber daya anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dapat mencapai tujuan yang diharapkan [19].

Disposition (Sikap Implementator)

Aspek Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap dukungan dari pelaksana dan komitmen pelaksana terhadap program untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, di mana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari karakteristik agen pelaksana jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapakannya [14]

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai sikap pelaksana program P3EL. Sebagai berikut:

“kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar program P3EL ini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran kepada kelompok usaha yang membutuhkan modal. Kembali lagi kita sudah memberikan sosialisasi terkait P3EL ini, selain ada sosialisasi ada juga tindak lanjut dari hasil sosialisasi itu yaitu pengajuan proposal ke kami tentunya verifikasi awal dari kami, verifikasi yang sederhana. Terus setelah itu kita sampaikan ke Bank Jatim karena sudah channeling dengan bank jatim untuk verifikasi lebih inti atau lebih lanjut. Karena misalnya dalam satu kelompok itu ada satu orang yang bermasalah misalnya ada cicilan lainnya itu juga sebagai catatan untuk tidak bisa mendapatkan pinjaman” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)



Gambar 3. Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program P3EL di Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Dinas PMD,2020.

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan sikap para pelaksana program, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program P3EL. Tidak hanya melaksanakan program P3EL sebagai formalitas, tetapi benar-benar mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan program ini. Berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan oleh para pelaksana untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program P3EL. Para pelaksana program telah memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Proses sosialisasi dan verifikasi telah dilakukan, dan masalah pinjaman apa pun yang belum terbayar dalam suatu kelompok, maka Bank Jatim dapat mendiskualifikasi mereka untuk tidak menerima pinjaman. Hal tersebut guna melaksanakan dan memastikan kelancaran program P3EL ini berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan program bergantung pada sikap para pelaksana. Ketika pelaksana memiliki disposisi yang baik, mereka akan lebih mampu menjalankan kebijakan dengan baik. Hal ini serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Lisa Iryani, 2021) dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Bidang Usaha Industri Kecil” menunjukkan kebijakan pemberdayaan perempuan didalam pelaksanaannya didukung oleh pihak yang bertanggungjawab. Pihak pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Aceh Utara mendukung penuh usaha industry kecil ini bahkan mereka berupaya segala cara agar usaha industry kecil ini dapat maju dan semakin berkembang. Sehingga dalam hal pelaksanaan implementasi program dapat sesuai seperti yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan sebelumnya [11]. Oleh karena itu, adanya sikap pelaksana yang meliputi dukungan dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Struktur Birokrasi

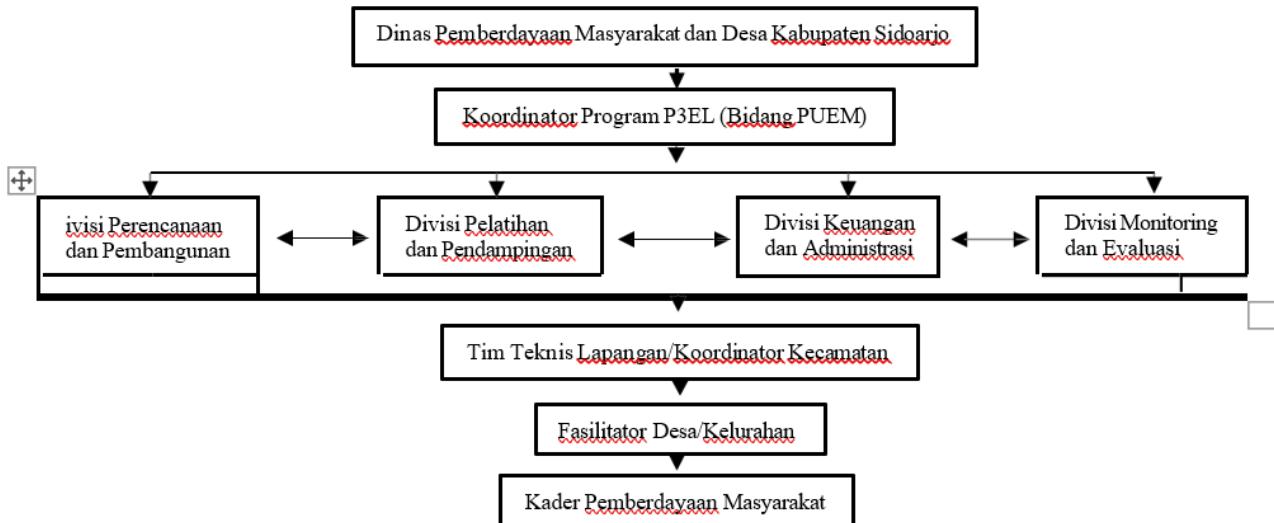
Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik utama birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi [14]. Dalam pelaksanaan Program P3EL terkait dengan SOP yang telah ditetapkan untuk mengatur dan menentukan yang berhak menerima program P3EL ini, karena program ini diperuntukkan bagi perempuan yang telah memenuhi kriteria penerima program P3EL.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Yetti selaku Kabid PLKD Dinas PMD mengenai SOP pelaksanaan program P3EL. Sebagai berikut:

“kita bekerja sesuai SOP Mbak, gak mungkin kan kalau melenceng. kalau tidak sesuai SOP juga tidak di acc oleh Bank Jatim. Kita bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan, kalau tidak seperti itu kan Bank jatim tidak mau mencairkan kan. Ya jadi harus sesuai SOP. Dan untuk pencairan itu langsung masuk ke rekening tiap kelompok. Jadi setelah proposal pinjaman ke kita, kita teruskan ke bank jatim dan bank jatim melakukan verifikasi dan tinjau lapang, layak gak dapat pinjaman” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)

Bu Yetti juga menambahkan mengenai harapan dari adanya program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“harapan kita dengan adanya program P3EL ini sebagai supporting dari kelompok-kelompok pemberdaya perempuan di kabupaten sidoarjo lebih untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga atau perempuan itu sendiri. Untuk uang belanja, untuk meningkatkan roda perekonomian di masyarakat sekitar agar terus berjalan” (Wawancara tanggal 14 Mei 2024)



Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksanaan Program P3EL di Kabupaten Sidoarjo

Sumber:Diolah Oleh Peneliti, 2024.

Berdasarkan gambar 4, menunjukkan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, ini bertujuan untuk memenuhi SOP yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan dalam pelaksanaan program P3EL yang dilakukan oleh bidang PUEM sudah sesuai SOP yang telah ditentukan. Proses pencairan dilakukan oleh pihak Bank Jatim dan pencairannya langsung masuk ke rekening tiap kelompok. Namun jika tinjau lapangan dan proposal yang diajukan tidak sesuai maka kelompok peminjam tidak layak mendapatkan pinjaman. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya bekerja sesuai dengan SOP dalam proses pencairan pinjaman dari Bank Jatim. Proses pencairan pinjaman dilakukan dengan ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan oleh bidang PUEM Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan program P3EL dengan baik sesuai SOP yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Puja Afwanda Mayako, Zaili Rusli, dan andianto, 2020) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau”. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa ditinjau dari prosedur menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan semuanya dilakukan berdasarkan SOP yang ada sehingga kegiatan apapun yang dilakukan menjadi terarah serta terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, suatu kebijakan harus didukung dengan adanya prosedur dan mekanisme yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan [20].

IV. SIMPULAN

Implementasi Program P3El di Sidoarjo telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan teori Edward III, hal ini diukur dari empat indikator sesuai dengan teori implementasi oleh Edward III yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwasanya dalam indikator Komunikasi, pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo melibatkan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan usaha ekonomi perempuan, yang memberikan dampak langsung berupa terbantunya kelompok penerima program P3EL dalam penambahan modal usaha. Namun, terdapat kekurangan dalam sosialisasi program ini karena hanya beberapa kecamatan saja yang mengetahui dan mendapatkan manfaat dari program P3EL. Untuk meningkatkan jangkauan, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas melalui media digital dan perlibatan perangkat desa secara aktif.

Berdasarkan indikator Sumber Daya, menunjukkan para pelaksana program P3EL di Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo sudah berkompeten. Mereka memiliki tim pelaksana yaitu bidang PUEM yang memahami program dengan baik dan sumber daya anggaran yang memadai, termasuk melibatkan Bank Jatim sebagai penyalur pinjaman. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup serta sumber daya anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Keterbatasan tenaga pelaksana masih menjadi kendala dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan sistem monitoring perlu ditingkatkan.

Berdasarkan indikator Disposisi (sikap pelaksana), menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah berupaya dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Terdapat pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai tujuan program P3EL, dan para pelaksana program telah memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Selain itu, para pelaksana juga menunjukkan komitmen tinggi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Mereka secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas PMD dan pihak desa, untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Meskipun demikian, tantangan terkait kurangnya koordinasi dan sosialisasi masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar dampak positif dari program dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kepatuhan dalam pelaksanaan, menunjukkan pelaksanaan program P3EL oleh bidang PUEM telah menjaga kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Pencairan dana dilakukan sudah sesuai SOP dan program ini mendukung pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan Perempuan itu sendiri. Pelaksana kebijakan di Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo berhasil melaksanakan program P3EL dengan baik sesuai SOP yang ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT berkat atas rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo” dengan lancar. Tidak lupa juga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini karena penulismenyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak terutama orang tua penulis dan pihak Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengakui masih banyak kesalahan dalam ikhtiar ilmiah ini, namun dengan izin Allah SWT permasalahan tersebut dapat diperbaiki. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan, namun berharap isi artikel ini dapat memberikan manfaat yang besar. Serta Terimakasih kepada semua pihak lainnya yang senantiasa memberikan dukungan dan membimbing saya dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Sultan, H. C. Rahayu, And Purwiyanta, “Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Pp. 75–83, Mar. 2023, Doi: 10.37034/InfFeb.V5i1.198.
- [2] D. Cahyadi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, A. Basofi, And D. B. Santoso, “Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia,” 2017.
- [3] K. D. Vega Nilla Sari, U. Dewi, And Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Balai Ekonomi Desa Di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang / Community Empowerment Through Village Economic Program In Tuksongo Village, Borobudur Subdistrict, Magelang Regency,” Thesis, 2021.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009.
- [5] B. Beloan, N. Iriani, N. Ilyas, And A. Jamaluddin, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.” [Online]. Available: [Http://Jurnal.Advertisi.Or.Id/Index.Php/Jtcsa/](http://Jurnal.Advertisi.Or.Id/Index.Php/Jtcsa/)
- [6] P. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 2008.
- [7] Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” Dec. 2019. [Online]. Available: <Https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id>

- [8] R. M. A. Putra, "Pemenuhan Hak Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Materi Hak Asasi Manusia (Studi Di Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)," 2015.
- [9] H. Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana," 2010.
- [10] R. W. Winarti, "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL Plus) (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Determinan Yang Mendukung Keberhasilan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL Plus) Di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).", 2009.
- [11] L. Iryani And S. Sos, "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Bidang Usaha Industri Kecil (Studi Di Gampong Matang Meunye Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)," 2021.
- [12] E. Wahyuni, F. S. Rahmadini, And S. N. Laili, "Evaluasi Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Di Kabupaten Sidoarjo," *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 2, P. 420, May 2021, Doi: 10.35817/Jpu.V4i2.18052.
- [13] M. Jannah And I. Rodiyah, "Implementation Of The Family Hope Program (PKH) In Gemurung Village, Sidoarjo Regency," *Archive Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, P. 1, 2023.
- [14] J. Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.
- [15] R. M. Putri Putri, S. Sjamsuddin, F. Nurani, And Jurusan Administrasi Publik, Fia, Universitas Brawijaya, "Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Jender Di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang (Studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang).", 2013.
- [16] A. Syarif, A. A. Unde, And L. Asrul#, "The Importance Of Communication And Information In The Implementation Of Disaster Management Policy In Makassar City," 2014.
- [17] E. W. Maryam And R. Dewanti, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Melalui Program P3el Kabupaten Sidoarjo," 2015.
- [18] A. Sarah, "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- [19] H. Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana," 2010.
- [20] P. Afwanda Mayako, Z. Rusli, And Adianto, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitass Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau," *Japs: Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, P. 1, Aug. 2020, [Online]. Available: <Https://Japs.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/Japs>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.